

## **ABSTRAK**

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta dalam hal penegakan hukum, sehingga apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri itu merupakan suatu kejahatan yang melanggar kode etik profesi Polri, di samping akan menerima sanksi hukum pidana, juga akan menerima sanksi administratif sesuai aturan kode etik profesi Polri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah proses hukum bagi anggota Polri yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba? dan Bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dikenakan terhadap Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap peraturan perundangan-undangan mengenai penyalahgunaan narkoba yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Anggota Polri yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lainnya di dalam praktek. Bahan hukum sekunder menjadi bahan pendukung di dalam penelitian ini disamping bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis oleh penulis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Proses hukum bagi anggota Polri dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar diberikan putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama untuk dijadikan dasar hukum bahwa sudah terpenuhinya syarat untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri. Selain itu, penerapan sanksi hukum pidana dan sanksi administratif bagi anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berdasarkan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **ABSTRACT**

The National Police has the main duties and functions as protector, public servant, and law enforcer. If a narcotics abuse crime is committed by a member of the National Police it is a crime that violates the ethics code of the National Police profession. For their actions, in addition to receiving criminal sanctions, they will also receive administrative sanctions in accordance with the profession ethics code of The Indonesian National Police. The problem in this thesis is how is the legal process for members of the Indonesian National Police who have been proven to have committed the misuse of narcotics crime and how is the application of criminal law sanctions and sanctions of the National Police Professional Ethics imposed on Police of The Republic Indonesia on members who have committed drug abuse violations.

This research uses a normative juridical approach based on primary legal material by conducting a deeper study of the laws and regulations regarding narcotics abuse contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and on Members of the National Police contained in Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, and other regulations in practice. Secondary legal material become supporting material in this study in addition to primary legal materials. Secondary legal material are in the form of books, scientific journals, articles that have a relationship with the discussion of this research. Then, the data were studied and analyzed by the author which is then referred to as legal material.

Based on the results of research, the following conclusions are obtained : the legal process for members of the Indonesian National Police in the case of narcotics abuse crimes in order to be given a decision by a judge at the First District Court is used as a legal basis that the requirements for the conduct of the profession ethics code of the Indonesian national police have been fulfilled. In addition, the application of criminal law and administrative sanctions for members of the Indonesian National Police who have committed violations of narcotics abuse is based on Law Number 2 of 2002 concerning The Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Government Regulation of The Republic Indonesia Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of The Indonesian National Police, Regulation of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning The Profession Ethics Code of The Indonesian National Police, Regulation of the Indonesian National Police Number 19 of 2012 concerning Organizational Structure and Working Procedures of the Ethics Code Commission of the Indonesian National Police.